

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Boven Digoel tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	1 : 3.333
2	Rasio dokter Gigi per penduduk	Per 1.000 penduduk	1:10.000
3	Rasio bidan per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	1 : 909
4	Rasio perawat per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1 : 625
5	Puskesmas yang memiliki dokter	Per distrik	14
6	Tersedianya laporan kinerja keuangan (akuntabilitas kinerja OPD)	1 dokumen	100
7	Tersedia data Penyakit Menular	1 Dokumen	1
8	Tersedia data penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa	1 dokumen	1
9	Tersedia data penyakit berpotensi wabah / KLB	1 dokumen	1
10	Tersedia data masalah gizi, KIA dan KB	1 dokumen	1
11	Tersedia data dasar puskesmas	1 dokumen	1
12	Tersedia perkembangan pelaksanaan SPM	1 dokumen	1
13	Tersedianya Data SDM Kesehatan	1 dokumen	1
14	Tersedia Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 dokumen	1
15	Tersedianya Data ALKES, Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 dokumen	1
16	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1 Dokumen	1
17	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	20 Puskesmas	1
18	Cakupan Penyampaian Laporan bulanan puskesmas maksimal tanggal 10 bulan berjalan	20 Dokumen	1
19	Angka kelangsungan hidup bayi (AKB) Per 1000 kelahiran Hidup	1000/1000	1000/1000
20	Angka kematian Bayi	1/1000	1/1000
21	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1/1000	1/1000
22	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran Hidup	Per 1000	1/1000
23	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup/kasus	Per 100.000 kasus	0
24	Cakupan kunjungan Bayi	%	70

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
25	Cakupan Gizi buruk mendapat perawatan	%	100
26	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum	%	0
27	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Anak Usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100
28	Angka Balita Gizi Buruk	%	0
29	Prevalensi balita Gizi Kurang	Per 1000	35
30	Balita mendapat PMT	100	100
31	Bayi Mendapat Vitamin A	%	100
32	Balita mendapat Vitamin A 2 X	%	100
33	Ibu Nifas mendapat Vitamin A	%	100
34	Ibu Hamil Mendapat PMT	%	100
35	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa kelas I SD/MI	%	60
36	Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin secara gratis di puskesmas	%	100
37	Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan Mulut	0	100
38	Penduduk yang di periksa dan mendapat kan pengobatan mata	%	0
39	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	90
40	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang berbahaya	%	50
41	Obat dan Makanan yang memenuhi standart	%	100
42	Cakupan rawat jalan	%	100
43	Cakupan kunjungan Rawat Inap	%	100
44	Peserta pembinaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan	%	0
45	Rasio Posyandu per 100 balita	2/100	2/100
46	Cakupan kunjungan Bumil K4	%	70
47	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82
48	Cakupan Pelayanan Nifas	%	70
49	Kunjungan Neonarus (KN Lengkap)	%	70
50	Kunjungan BBLR yang ditangani	%	70

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
51	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100
52	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	100
53	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82
54	Cakupan kunjungan Bayi	%	70
55	Pelayanan kesehatan bayi	%	70
56	Pelayanan kesehatan anak Balita	%	70
57	Peserta KB Baru	%	15
58	Peserta KB Aktif	%	80
57	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standart	%	70
58	Cakupan kampung UCI	%	112
59	Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	2058
60	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	2/100.000
61	Cakupan balita penderita penyakit pneumonia yang ditangani	%	708
62	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	289
63	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	0
64	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100
65	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85
66	Angka Case Fatality Rate (CFR) DBD diharapkan 0 kasus,	%	0
67	Angka Case Fatality Rate (CFR) Diare <1,2%	%	<1,2
68	Penderita Malaria yang diobati	%	100
69	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 pddk	<5/1000
70	Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0
71	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	100
72	Proporsi anak balita yang demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100
73	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	2,3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
74	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100
75	Cakupan kampung / distrik mengalami KLB yang lakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	%	100
76	Prevalensi Kusta <1/10.000	Per 10.000 Penduduk	<1/10.000
77	Prevalensi Frambusia sebesar <1/100.000	Per 100.000 Penduduk	<1/100.000
78	POPM Filariasis	%	100
79	Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM	%	15 pkm
80	Presentase Kampung yang Melaksanakan Kegiatan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) PTM	%	40
81	Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia \geq 18 tahun	%	1088
82	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70
83	Prevalensi penduduk usia \geq 15 tahun dengan gula darah tinggi	%	6,42
84	Persentase penyandang diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	70
85	Presentasi Cakupan Pemeriksaan IVA	%	39,75
86	Presentasi ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Sesuai standar	%	80
87	Cakupan Rumah Tangga BerPHBS	%	61
89	Cakupan Kampung siaga	%	40
90	Presentase Rumah Sehat	%	55
91	Tersedianya dokumen LAKIP	%	100
92	Profil kesehatan tahun 2018	%	100
93	Terwujudnya dokumenn laporan tahunan;	%	100
94	Rasio Puskesmas /Distrik	%	100
95	Cakupan Puskesmas	%	100
96	Rasio Pustu per satuan Penduduk	Per satuan penduduk	1:1.654
97	Cakupan pustu	%	112

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel 2018

2.2. RENCANA STRATEGIS

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Boven Digoel, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan pemukiman, gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel memiliki :

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel

a. Visi

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dalam upaya mencapai Visi: terwujudnya pembangunan kesehatan menuju masyarakat Boven Digoel yang sehat. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan 2021, yaitu : (1) Perikemanusiaan; (2) Pemberdayaan dan Kemandirian; (3) Adil dan Merata; (4) Pengutamaan dan Manfaat serta bermutu.

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut, dan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2021 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016-2021, dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan, maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel yang mengacu pada visi Kementerian Kesehatan yaitu *“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan 2015”* dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021

adalah **”Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** serta Visi Kabupaten Boven Digoel dalam (RPJP) tahun 2005-2025 yaitu **”Terwujudnya kemandirian masyarakat Boven Digoel dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan hidup dan budaya ”**.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 adalah **”Terwujudnya pembangunan kesehatan menuju masyarakat Boven Digoel yang sehat”**. Perumusan penjelasan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
3. Menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya secara berkelanjutan;
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

b. Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya **”Pelayanan Kesehatan Profesional Menuju Kemandirian Masyarakat Untuk Sehat 2021”**, maka ditetapkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 s.d 2021 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya kesehatan;
2. Meningkatkan sistim informasi dan perencanaan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi;

3. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan mutu pelayanan bagi seluruh masyarakat;
4. Mewujudkan ketersediaan alat kesehatan (alkes), obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau pada semua unit pelayanan kesehatan;
5. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
6. Mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangan penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana;
7. Mengupayakan jaminan pemeliharaan & pembiayaan kesehatan masyarakat miskin;

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya kesehatan;	1.1 Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia kesehatan;
2. Meningkatkan sistem informasi dan perencanaan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi;	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan sistem pembangunan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan secara tepat, cepat dan akurat;
3. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan mutu pelayanan bagi seluruh masyarakat;	3.1 Tercapainya peningkatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan professional;
4. Mewujudkan ketersediaan alat kesehatan (alkes), obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau pada semua unit pelayanan kesehatan;	4.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan penggunaan obat secara rasional serta meningkatnya pengendalian/ pengawasan obat dan makanan yang berbahaya;

<p>5 Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;</p>	<p>5.1 Meningkatnya kemauan dan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, status gizi, pencegahan dan pemutusan rantai penularan penyakit;</p>
<p>6 Mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangan penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana;</p>	<p>6.1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan paradigma sehat mandiri yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan, penyembuhan penyakit, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai lanjut usia;</p>
<p>7 Mengupayakan jaminan pemeliharaan & pembiayaan kesehatan masyarakat miskin</p>	<p>7.1 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta pembiayaan kesehatan lainnya;</p>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel 2018

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018

Tujuan		Sasaran	
1.1	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kesehatan	1.1.1	<p>Tersedianya SDM kesehatan yang didistribusikan secara adil dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dengan memperhitungkan rasio sumber daya manusia kesehatan dengan jumlah penduduk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio dokter dengan penduduk 1 : 1.000 penduduk 2) Rasio bidan dengan penduduk 1 : 1.000 penduduk 3) Rasio perawat dengan penduduk 1: 1.000 penduduk 4) Puskesmas yang memiliki tenaga dokter 80%
2.1	Terwujudnya penyelenggaraan sistem pembangunan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan secara cepat, tepat, dan akurat;	2.1.1	Tersedianya data kinerja keuangan
		2.1.2	<p>Tersedianya data dasar kesehatan yang akurat dan berbasis bukti (evidence based) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia data penyakit menular 2) Tersedia data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 3) Tersedia data penyakit berpotensi wabah/KLB; 4) Tersedia data masalah gizi, KIA dan KB; 5) Tersedia data dasar puskesmas; 6) Tersedia perkembangan pelaksanaan SPM; 7) Tersedia data perkembangan kampung siaga; 8) Tersedia data SDM Kesehatan, 9) Tersedia data sarana dan prasaran kesehatan; 10) Tersedia data ALKES, obat dan perbekalan kesehatan; <p style="text-align: right;">Peningkatan SIK (Sistem Informasi Kesehatan);</p>

	Tujuan		Sasaran
			11) Peningkatan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas); 12) Penyampaian laporan bulanan puskesmas maksimal tanggal 10 bulan berjalan;
3.1	Tercapainya peningkatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan profesional;	3.1.1 3.1.2	Meningkatnya akses pelayanan yang bermutu, adil dan merata; Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin secara gratis di puskesmas sebesar 100% ;
4.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan penggunaan obat secara rasional serta meningkatnya pengendalian/ pengawasan obat dan makanan yang berbahaya;	4.1.1 4.1.2	Ketersediaan obat esensial - generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 100%; Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang berbahaya;
5.1	Meningkatkan kemauan dan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, status gizi, pencegahan dan pemutusan rantai penularan penyakit;	5.1.1 5.1.2	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan informasi kesehatan 100%; Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan Sumber daya alam (SDA) di bidang kesehatan;

6.1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan paradigma sehat mandiri yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan lanjut usia, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan, penyembuhan penyakit, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai lanjut usia;	6.1.1	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak;
		6.1.2	Upaya peningkatan kesehatan lanjut usia
		6.1.3	Upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit adalah persentase kampung yang mencapai <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) sebesar 80%; Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar 93%, Non Polio AFP rate 2 per 100.000 penduduk, Cakupan balita pneumonia yang ditangani sebesar 100%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC sebesar 90%, Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), Tidak adanya kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 100%, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati

7.1	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta pembiayaan kesehatan lainnya;	7.1.1	Peningkatan kapasitas umum administrasi perkantoran;
		7.1.2	Tersedianya sarana dan prasarana: 1) Tersedianya kendaraan dinas 2) Tersedianya bahan logistic dan obat RSB 3) Pemeliharaan kendaraan dinas 4) Pembangunan puskesmas, pustu, dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 5) Pembangunan instalasi rawat jalan dan rawat inap 6) Pembuatan pembuangan air kotor 7) Cakupan sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sebesar 100%;

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel 2018

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

(Sasaran 1)

Tersedianya SDM kesehatan yang didistribusikan secara adil dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dengan memperhitungkan rasio sumber daya manusia kesehatan dengan jumlah penduduk.

Kebijakan

Peningkatan sumber daya kesehatan dari aspek SDM Kesehatan, Sarana dan Prasarana maupun pembiayaan kesehatan;

Indikator Sasaran

Tersedianya SDM Kesehatan dari segi kuantitas dan kualitas

Program:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Manajemen pelayanan kesehatan.

Kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Bimbingan teknis Implementasi perundang-undangan;
3. Pembinaan Teknis Kepegawaian dan Penatausahaan Keuangan;
4. Pembinaan Tenaga Fungsional;
5. Pembinaan Penyusunan Laporan keuangan puskesmas berbasis Kinerja;
6. Pelatihan Kegawatdaruratan;
7. Pelatihan kesehatan gigi dan mulut;
8. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan;
9. Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan kesehatan;
10. Penyelenggaraan rapat kerja kesehatan daerah;

Indikator Kinerja:

1. Rasio dokter dengan penduduk 1 : 1.000 penduduk;
2. Rasio bidan dengan penduduk 1 : 1.000 penduduk;
3. Rasio perawat dengan penduduk 1: 1.000 penduduk;
4. Puskesmas yang memiliki tenaga dokter 80%.

(Sasaran 2)

Tersedianya data kinerja keuangan

Kebijakan

Peningkatan data keuangan yang berbasis kinerja

Indikator Sasaran

Tersedianya data keuangan yang berbasis kinerja

Program

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA-OPD

Indikator Kinerja

Tersedianya laporan kinerja keuangan (Akuntabilitas Kinerja OPD);

(Sasaran 3)

Tersediannya data dasar kesehatan yang akurat dan berbasis bukti (evidence based).

Kebijakan

Peningkatan data yang evidence based

Indikator Sasaran

Tersedianya data yang berbasis bukti (evidence based)

Program

Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Kegiatan

Penyusunan Laporan Tahunan, Penyusunan Profil, dan Komunikasi Data (SIK).

Indikator Kinerja:

1. Tersedia data penyakit menular;
2. Tersedia data penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Tersedia data penyakit berpotensi wabah/KLB;
4. Tersedia data masalah gizi, KIA dan KB;
5. Tersedia data dasar puskesmas;
6. Tersedia data perkembangan pelaksanaan SPM;

7. Tersedia data perkembangan kampung siaga;
8. Tersedia data SDM Kesehatan,
9. Tersedia data sarana dan prasarana kesehatan;
10. Tersedia data ALKES, obat dan perbekalan kesehatan;
11. Peningkatan SIK (Sistem Informasi Kesehatan);
12. Peningkatan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas);
13. Cakupan penyampaian laporan bulanan puskesmas maksimal tanggal 10 bulan berjalan.

(Sasaran 4)

Meningkatnya akses pelayanan yang bermutu, adil dan merata.

Kebijakan

Peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Indikator Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata.

Program:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat.

Kegiatan

1. Peningkatan kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
3. Pelayanan kesehatan masyarakat (KPS);
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN Kapitasi);
5. Biaya Operasional Kesehatan (BOK);
6. Jaminan Persalinan;
7. Pembinaan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas;
8. Bimbingan teknis JKN (KIS);
9. Operasional Puskesmas;
10. Operasional RSB;
11. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
12. Biaya operasional kesehatan fasilitas rujukan UKM;
13. Kaji banding sistem informasi dan manajemen puskesmas;

14. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN Non Kapitasi);
15. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
16. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
17. Pemberian tambahan makanan dan vitamin;
18. Pemantauan tumbuh kembang balita;
19. Pemberian makanan tambahan .

Indikator Kinerja

1. Angka kelangsungan hidup bayi;
2. Angka kematian bayi;
3. Angka kematian balita;
4. Angka kematian neonatal;
5. Angka kematian ibu;
6. Cakupan kunjungan bayi;
7. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
8. Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum;
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
10. Angka balita gizi buruk;
11. Prevalensi balita gizi kurang;
12. Balita mendapat PMT;
13. Bayi mendapat Vitamin A;
14. Balita Mendapat Vitamin A 2X;
15. Ibu nifas mendapat Vitamin A;
16. Ibu hamil mendapat PMT;
17. Cakupan penjangingan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI.

(Sasaran 5)

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin secara gratis di puskesmas sebesar 100%.

Kebijakan

Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin secara gratis

Indikator Sasaran:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi keluarga miskin secara gratis;
2. Pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Program :

1. Upaya kesehatan masyarakat;
2. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.

Kegiatan:

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
3. Pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak.

Indikator Kinerja:

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin secara gratis di puskesmas;
2. Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
3. Penduduk yang diperiksa dan mendapatkan pengobatan mata.

(Sasaran 6)

Ketersediaan obat esensial - generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 100%

Kebijakan

Peningkatan ketersediaan obat esensial – generik di puskesmas dan jaringannya

Indikator Sasaran

1. Tersedianya obat esensial-generik di semua sarana pelayanan kesehatan;
2. Pemantauan hasil ketersediaan obat.

Program

Obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Indikator Kinerja

Ketersediaan obat esensial - generik di semua sarana pelayanan kesehatan

(Sasaran 7)

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang berbahaya

Kebijakan

Menjamin keamanan ketersediaan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan

Indikator Sasaran

1. Adanya pengawasan obat dan makanan terhadap konsumen;
2. Pemantauan hasil pengawasan obat dan makanan.

Program

1. Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengembangan obat asli indonesia.

Kegiatan

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
2. Pengujian laboratorium obat dan makanan;
3. Pelatihan standarisasi tanaman obat bahan alami indonesia.

Indikator Kinerja

1. Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang berbahaya;
2. Obat dan makanan yang memenuhi standar.

(Sasaran 8)

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan informasi kesehatan 100%;

Kebijakan

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan informasi kesehatan

Indikator Sasaran

1. Peningkatan standar pelayanan kesehatan;
2. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan;
3. Pengolahan pelayanan informasi kesehatan.

Program

Standarisasi pelayanan kesehatan

Kegiatan

1. Pembinaan perijinan sarana dan tenaga kesehatan;
2. Akreditasi puskesmas;
3. Registrasi puskesmas.

Indikator Kinerja

3. Cakupan kunjungan rawat jalan;
4. Cakupan kunjungan rawat inap;
5. Peserta pembinaan perijinan sarana dan tenaga kesehatan.

(Sasaran 9)

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di bidang kesehatan;

Kebijakan

Peningkatan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan

Indikator Sasaran

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program

Perbaikan gizi masyarakat

Kegiatan

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Indikator Kinerja

Rasio Posyandu per 100 Balita;

(Sasaran 10)

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak adalah cakupan K4 ibu hamil 95%, penanganan komplikasi pada ibu hamil 100%, kunjungan neonatus (KN1) 90%, kunjungan BBLR ditangani 100%, kunjungan Bayi sesuai standar 90%, kunjungan SDDTK balita 60%, pertolongan persalinan nakes 90%, kunjungan KB baru dan aktif 70%, kunjungan ibu nifas sesuai standar 90%, dan kunjungan neonatus lengkap (KN3) 90%;

Kebijakan

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Indikator Sasaran

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil (ANC);
2. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
3. Peningkatan perawatan bumil, buhir dan bayi di puskesmas;
4. Penjaringan deteksi risiko tinggi pada ibu hamil, neonatus dan bayi;
5. Peningkatan rujukan kasus;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
7. Peningkatan penyuluhan kesehatan balita;
8. Peningkatan pelatihan dan pendidikan perawatan balita;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

Program

1. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

Kegiatan

1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu;
2. Operasional Rumah Tunggu;
3. Sosialisai penanganan komplikasi maternal dan neonatal;
4. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita;
5. Pelatihan penanganan manajemen terpadu balita sakit;
6. Manajemen deteksi dini tumbuh kembang;
7. Penyuluhan kesehatan anak balita.

Indikator Kinerja

1. Cakupan ibu hamil K4;
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;
3. Cakupan pelayanan nifas;
4. Kunjungan Neonatus 1 (KN1);
5. Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap);
6. Kunjungan BBLR ditangani;
7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

8. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Pelayanan Kesehatan Bayi;
9. Pelayanan kesehatan bayi
10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita (SDIDTK);
11. Peserta KB Baru;
12. Peserta KB Aktif.

(Sasaran 11)

Upaya peningkatan kesehatan lanjut usia

Kebijakan

Peningkatan kesehatan, kemandirian, keaktifan dan produktifitas lanjut usia

Indikator Sasaran

Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia

Program

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu lansia

Indikator Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar.

(Sasaran 12)

Upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit adalah persentase kampung yang mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 95%; Angka *Case Detection Rate* penyakit TB sebesar 90% dan angka keberhasilan pengobatan TB di atas 85%; Angka *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) diharapkan $\geq 2/100.000$ anak usia kurang dari 15 tahun, Penderita malaria yang diobati sebesar 100%, CFR diare pada saat KLB adalah $< 1,2\%$, ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapat pengobatan ARV sebanyak 100%, terselenggaranya sistem surveilans dan kewaspadaan dini serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah secara berjenjang hingga ke kampung, tekanan darah tinggi pada penduduk usia ≥ 18 tahun sebesar 24,6%, penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar sebesar 70%, penduduk usia ≥ 15 tahun dengan gula darah tinggi sebesar 6,54%, penyandang diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 70%, ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 70%, puskesmas yang melaksanakan pelayanan PTM terpadu sebesar 70%, desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (POSBINDU PTM) sebesar 60%;

Kebijakan

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Indikator Sasaran

1. Peningkatan frekuensi penyemprotan sarang nyamuk;
2. Peningkatan pemberian vaksin bagi balita dan anak sekolah;
3. Peningkatan surveilans penyakit menular dan penanggulangan wabah/KLB;
4. Peningkatan kampung UCI;
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pencegahan & penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan;
7. Meningkatnya pemeriksaan hipertensi;
8. Meningkatnya pemeriksaan diabetes melitus;
9. Terlaksananya screening penyakit tidak menular;
10. Terlaksananya kegiatan POSBINDU PTM.

Program

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
3. Peningkatan imunisasi;
4. Pelacakan kasus diare;
5. Pelacakan kasus Tuberculosis (TBC);

6. Survei jentik DBD;
7. Pelatihan VCT/PITC;
8. Filariasis;
9. Sosialisasi HIV dan AIDS;
10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria;
11. Penanggulangan TBC, Malaria, Frambusia , Kusta, Taeniasis, Penyakit Tidak Menular;
12. Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM);
13. Pos Bimbingan Terpadu (POSBINDU);
14. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM);
15. Pelatihan penatalaksanaan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat.

Indikator Kinerja

1. Cakupan kampung UCI;
2. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak;
3. Non polio AFP rate per 100.000 penduduk;
4. Cakupan balita penderita pneumonia yang ditangani;
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif;
6. Tingkat prevalensi TB per 100.000 penduduk;
7. Tingkat kematian karena TB per 100.000 penduduk;
8. Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS;
9. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS;
10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;
11. Prevalensi kusta <1/10.000;
12. Microfilaria rate (MFR) <1%;
13. Persentase penderita diare yang ditangani;
14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria;
15. Angka kejadian malaria;
16. Tingkat kematian akibat malaria;
17. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida;

18. Proporsi anak balita yang demam dan diobati dengan obat anti malaria yang tepat;
19. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi;
20. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir;
21. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS;
22. Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia ≥ 18 tahun;
23. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
24. Prevalensi penduduk usia ≥ 15 tahun dengan gula darah tinggi;
25. Persentase penyandang diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
26. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan PTM Terpadu;
27. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu (POSBINDU PTM).

(Sasaran 13)

Upaya promosi kesehatan adalah terwujudnya komitmen semua unsur/*stakeholders* pembangunan kesehatan di semua tingkat akan pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini menjalin kemitraan lintas sektor antara LSM maupun organisasi masyarakat lainnya, terselenggaranya promosi kesehatan berskala nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan PHBS, dan meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 75%;

Kebijakan

Mengembangkan kemandirian keluarga dalam pelayanan kesehatan;

Indikator Sasaran

1. Pengembangan model promosi kesehatan spesifik;
2. Peningkatan frekuensi penyuluhan;
3. Peningkatan kapasitas pengelola program promosi kesehatan;
4. Terlaksananya pembentukan kampung siaga aktif.

Program

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
2. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan;
3. Pembinaan kampung siaga;
4. Sosialisasi kawasan bebas rokok;
5. Pelatihan penyuluhan keamanan pangan;
6. Sosialisasi kesehatan kerja;
7. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat;

Indikator Kinerja

1. Rumah Tangga ber-PHBS;
2. Persentase Rumah Sehat;
3. Kegiatan Promosi Kesehatan;
4. Persentase kampung siaga aktif.

(Sasaran 14)

Peningkatan kapasitas umum administrasi perkantoran;

Kebijakan

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Sasaran

Peningkatan kelengkapan administrasi perkantoran

Program

Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan bahan logistik kantor;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Indikator Kinerja

1. Tersedianya dokumen LAKIP;
2. Terwujudnya buku profil kesehatan tahun 2018;
3. Terwujudnya dokumen laporan tahunan.

(Sasaran 15)

Tersedianya Sarana & Prasarana

Kebijakan

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;

Indikator Sasaran

1. Tersedianya kendaraan dinas;
2. Tersedianya bahan logistic dan obat RSB;
3. Pemeliharaan kendaraan dinas;
4. Pembangunan puskesmas, pustu, dan rumah tunggu kelahiran (RTK);
5. Pembangunan instalasi rawat jalan dan rawat inap;
6. Pembuatan pembuangan air kotor.

Program

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jejaringnya;
3. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;

Kegiatan

1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pengadaan meubelair;
5. Pembangunan puskesmas;

6. Pembangunan puskesmas pembantu;
7. Pengadaan puskesmas keliling;
8. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas;
9. Pembangunan rumah tunggu kelahiran (RTK);
10. Monitoring dan evaluasi pelaporan;
11. Pengadaan sarana dan prasarana air limbah;
12. Pembangunan instalasi rawat jalan;
13. Pembangunan ruang gawat darurat.

Indikator Kinerja

1. Rasio puskesmas per distrik;
2. Cakupan puskesmas;
3. Rasio pustu per satuan kampung;
4. Cakupan pustu.

1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel tahun 2018 mengacu kepada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016–2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2018. Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan penetapan kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :